

### **BAB III**

## **REAKSI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH THAILAND SERTA PBB TERHADAP LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI THAILAND**

Munculnya komunitas LGBT di Thailand membawa beberapa reaksi masyarakat Thailand terkait dengan gaya hidup komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender. Reaksi yang muncul dari masyarakat Thailand tersebut membawa dampak negatif bagi komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender sehingga komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender memberikan aksi-aksinya yang diantaranya adalah aksi gerakan pembentukan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga yang dimunculkan melalui gerakan sosial di masyarakat Thailand, aksi gerakan secara langsung yang ditujukan pada pemerintah Thailand serta gerakan khusus yang ditujukan pada dunia internasional yakni PBB melalu OHCHR dan UNDP.

#### **A. Reaksi Masyarakat Terhadap Komunitas LGBT Di Thailand**

Komunitas LGBT dalam menjalankan kehidupannya di lingkungan sehari-hari tidak terlepas dari respon sosial masyarakat sekitar dimana mereka terkadang masih mendapatkan respon yang negatif berupa diskriminasi pada aspek kehidupan baik secara fisik maupun psikologis dimana hal itu dirasakan sebagai beban dari komunitas LGBT.

Reaksi sosial yang diberikan oleh masyarakat Thailand terhadap keberadaan komunitas LGBT juga tidak terlepas dari kedudukan atau jenis kelompok masyarakat di Thailand dimana masyarakat Thailand yang tergolong dalam kelompok homogen atau Thai umum diketahui sebagai kelompok netral atau dapat beradaptasi di antara

berbagai kelompok (Tuchrello, 1987). Hal ini berarti bahwa kelompok tersebut dalam merespon komunitas LGBT adalah sebagai komunitas yang memiliki hak untuk mempertahankan identitas seksual mereka sendiri sebagai bentuk dari ekspresi seksualnya baik ekspresi sebagai kaum homoseksual laki-laki, homoseksual perempuan, biseksual maupun transgender.

Sedangkan kelompok masyarakat Thailand selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang menjunjung ajaran Budha dan nilai-nilai sosial yang murni secara total sehingga kelompok ini sangat menentang akan keberadaan komunitas LGBT (Taywaditep, Coleman, Dumronggittigule, Bishop, & Robinson, 2004). Kaum LGBT dipandang sebagai komunitas yang bertentangan dengan ajaran Budha yaitu selayaknya manusia harus menjalankan kodrat dan takdirnya untuk menikah antara laki-laki dan perempuan serta memiliki keluarga baru yang menghasilkan generasi baru untuk meneruskan nilai-nilai luhur spiritual Budha dan nilai sosial sehingga mencapai moksa atau kesempurnaan. Selanjutnya laki-laki atau perempuan yang memiliki prinsip pencapaian kesempurnaan batin dan lahiriah dapat mengabdikan diri untuk Budha secara total tanpa melakukan pernikahan agar lebih mudah menyatu dengan Budha.

Kelompok masyarakat berikutnya adalah masyarakat yang memiliki dasar sosial dan struktur hidup yang dikendalikan oleh sistem elite serta mempunyai kekuasaan seperti monarki, militer, dan birokrat tingkat atas (Tuchrello, 1987). Kelompok-kelompok masyarakat ini memiliki tujuan yakni saling menguntungkan antar komunitas ekonomi dan bisnis yang sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan.

Kelompok ini memandang LGBT sebagai kelompok yang bisa menguntungkan dalam perekonomian karena sebagian besar kaum LGBT di Thailand memiliki status kepercayaan serta integritas yang tinggi terhadap sebuah usaha atau bisnis. Hal ini dipandang sebagai

langkah yang positif bagi kelompok elit di masyarakat yang mana kaum LGBT memiliki target sosial yakni menjadi kelompok mandiri yang mampu mengangkat perekonomian lokal atau internasional di Thailand sehingga kelompok ini dapat menerima komunitas LGBT sebagai rekan bisnis.

Kelompok selanjutnya adalah kelompok masyarakat di Thailand yang diberikan status tinggi dalam memegang kekuasaan serta martabat yang diberikan birokrat tertinggi. Kelompok ini terdiri dari kaum elit, birokrat dan militer yang memiliki konsistensi tinggi dalam jabatannya (Tuchrello, 1987). Sehubungan dengan keberadaan LGBT di Thailand, kelompok ini menganggap bahwa kaum LGBT adalah kaum yang tidak menjunjung tinggi gengsi dan martabat sebagai manusia dimana kelompok ini sangat menjunjung tinggi status sosialnya dalam masyarakat.

Status sosial menurut kelompok ini adalah status kekuasaan yang didasarkan pada penghargaan masyarakat dan pendidikan yang tinggi, kompetensi teknik yang memadai serta didasarkan pada nilai-nilai sosial serta spiritual sehingga dalam menjalankan perannya dalam masyarakat akan terlihat elegan dan dihormati oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang disertai dengan nilai-nilai kodratnya adalah hal yang penting dalam menunjang status sosial mereka.

Kelompok masyarakat Thailand berikutnya adalah kelompok keturunan cina dimana kelompok ini tidak memiliki pandangan tertentu terkait dengan keberadaan LGBT. Ada beberapa dari kelompok ini yang terlibat dalam komunitas LGBT namun ada yang tidak karena kelompok masyarakat ini hanya memiliki integritas tertinggi dalam menjalankan dunia bisnis secara total sehingga menganggap komunitas LGBT di Thailand adalah sebagai pilihan identitas serta ekspresi seksual semata.

Kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang memiliki kualitas serta kuantitas perekonomian tertinggi di Thailand dimana dalam mengaktualisasikan beberapa bisnisnya, mereka memiliki strategi khusus dengan mendekati diri pada elit politik, birokrasi dan militer di Thailand sehingga mereka dapat melakukan kontrol atas finansial, komersial, organisasi industri serta institusi (Tuchrello, 1987).

Golongan Cina ini terbagi menjadi dua bagian yakni kelompok Thai yang memiliki leluhur orang Cina dan sangat menjunjung tinggi lingkungan sosial serta budaya di Thailand sehingga kelompok ini masih kurang memberikan reaksi positif terhadap keberadaan komunitas LGBT. Sedangkan kelompok Cina selanjutnya adalah kelompok Cina murni yang memiliki kesuksesan sebagai wirausahawan, sedangkan di antara orang Thai, prestasi di militer atau birokrasi mendahulukan akses ke peluang atau sumber daya ekonomi yang signifikan. Banyak kelompok ini yang memiliki posisi di elit ekonomi sehingga mendapatkan prestise atau penghargaan dalam komunitas Cina selain juga menjadi penghubung antara komunitas itu dan elit Thailand, khususnya sehubungan dengan pembentukan ikatan ekonomi.

Kelompok ini merupakan kelompok yang tidak terlalu memberikan tekanan pada keberadaan LGBT karena masing-masing memiliki kebebasannya dalam mengaktualisasikan kebutuhan seksualnya. Hal ini terjadi karena golongan ini telah mengadopsi segala tatanan global dan modernisasi dalam unsur kehidupan sehingga memiliki kemungkinan besar dalam mempertahankan kebebasan antar individu dalam mencapai tujuan kehidupan seksualnya.

Berikut reaksi dari kelompok masyarakat di Thailand terhadap komunitas LGBT:

**Tabel 3.1: Reaksi kelompok masyarakat Thailand terhadap LGBT**

<b>Jenis Kelompok Masyarakat Thailand</b>	<b>Respon terhadap LGBT</b>
<b>Thai (Homogen)</b>	Komunitas LGBT sebagai komunitas yang memiliki hak untuk mempertahankan identitas seksual sebagai bentuk ekespresi seksual.
<b>Buddhist</b>	Dipandang sebagai komunitas yang bertentangan dengan ajaran Buddha.
<b>Masyarakat yang dikendalikan oleh sistem elit.</b>	Memandang LGBT sebagai kelompok yang bisa menguntungkan dalam perekonomian.
<b>Masyarakat dengan status tinggi kaum elit, birokrat dan militer</b>	Menganggap kaum LGBT tidak menjunjung tinggi gengsi dan martabat sebagai manusia yang dimana kelompok ini sangat menjunjung tinggi status sosial dalam masyarakat.
<b>Keturunan Cina</b>	Tidak terlalu memberikan tekanan pada keberadaan LGBT.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

## **B. Reaksi Pemerintah Thailand Terhadap Komunitas LGBT Di Thailand**

Pemerintah Thailand dalam memberikan respon terhadap keberadaan LGBT tidak terlepas dari bentuk negara Thailand dimana segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi polemik LGBT harus sesuai dengan prosedur kebijakan tatanan kenegaraan Thailand.

Thailand merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional dengan melibatkan legislatif bikameral yang dipilih secara demokratis (CIA, 2018). Setelah bertahun-tahun pemerintah Thailand dikendalikan oleh militer, Thailand menjadi sistem politik multipartai

dimana satu partai dengan partai yang lain sering bergantung pada pembentukan koalisi sejumlah partai untuk membentuk pemerintahan.

Pemerintahan Thailand pada saat ini adalah pemerintah tunggal pertama dengan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn semenjak 2016, diketahui memberikan pengaruh informal yang kuat dalam politik namun tidak pernah menggunakan kekuasaan konstitusionalnya untuk memvetolegislasi atau membubarkan legislatif.

Pada aspek legislatif, konstitusi mengakui raja sebagai seorang Buddhis tetapi juga sebagai "penegak agama." Sedangkan Dewan Penasihat merupakan sebuah badan konstitusional yang beranggotakan 18 orang dan bertugas untuk menasihati raja pada masalah legislasi, urusan pemerintahan, grasi, penghargaan, dan hal-hal lain yang membutuhkan tanda tangan raja (Library of Congress, 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut, raja Thailand dalam hal menanggapi tuntutan LGBT untuk dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga hingga saat ini masih menyerahkan pada pendapat dari Dewan Penasihat terkait dengan segala dampak baik dan buruknya dan Dewan Penasihat masih mempertimbangkan mengenai keutuhan dan kemurnian ajaran Budha yang menjadi simbol Thailand dimana pada ajaran Budha, segala fungsi dan peran yang dijalankan oleh umat manusia hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya. Di satu sisi, Dewan Penasihat Thailand yang mendampingi raja juga melihat bahwa masyarakat Thailand sebagian besar masih belum memberikan respon positifnya terhadap keberadaan LGBT sehingga dampak protes dari Thai kemungkinan akan terjadi terkait dengan pelestarian agama Budha yang menjadi simbol negara Thailand di mata dunia.

Sedangkan secara kekuasaan eksekutif, Dewan Menteri atau kabinet dipimpin oleh kepala pemerintahan yakni Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang dijabat

sejak 24 Agustus 2014 pada masanya, dimana Prayut yang dibantu oleh satu wakil perdana menteri militer dan lima wakil perdana menteri sipil hingga saat ini masih belum membahas tuntutan LGBT terkait dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga karena Dewan Menteri masih harus menunggu keputusan dari Dewan Penasihat raja Thailand terkait dengan keputusan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga tersebut (Library of Congress, 2007).

Pada konsep legislatif, Thailand memiliki legislatif bikameral yang disebut Majelis Nasional (Rathasapha), yang terdiri dari dua kamar yakni senat (Wuthisapha) yang terdiri dari 200 anggota yang dipilih secara populer dari konstituen kursi tunggal atas dasar non-partisan untuk jangka waktu enam tahun dimana jumlah kursi Senat ditentukan secara proporsional oleh provinsi.

Majelis Nasional juga terdiri dari kamar Dewan Perwakilan Rakyat (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang memiliki 438 anggota dan dipilih berdasarkan suara rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Presiden DPR melayani serentak sebagai presiden Majelis Nasional, dan presiden Senat berfungsi sebagai wakil presiden Majelis Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Nasional yang terdiri dari senat dan Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini telah menetapkan beberapa sanksi hukum bagi masyarakat Thailand yang diketahui telah mendiskriminasi serta melakukan tindakan kriminalisasi terhadap komunitas LGBT sebagai upaya pemerintah Thailand dalam menegakkan Hak Asasi Manusia serta sebagai penghargaan terhadap respon PBB melalui UNDP dan OHCHR dimana komunitas LGBT di Thailand harus dilindungi hak-haknya.

Berdasarkan konsep yuridis dan sistem hukum, sistem hukum Thailand merupakan sistem hukum perundang-undangan yang berarti bahwa sebagian besar

keputusan didasarkan pada undang-undang tertulis yang disahkan oleh legislatif dengan sumber utama hukum yakni konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi dan undang-undang seperti Codes and Acts serta keputusan dan kebiasaan (Gardner, 2018).

CDA merupakan badan legislatif di Thailand yang bertugas dalam menyusun Konstitusi Kerajaan Thailand secara permanen. Majelis semacam ini biasanya dibentuk setelah junta militer merebut kekuasaan di negara tersebut atau dengan alasan kebutuhan untuk menyelesaikan krisis politik dan sosial di Thailand yang diantaranya adalah kasus keberadaan LGBT dan pada bulan November 2006 dan Juni 2007, Anjaree dan kelompok LGBT lainnya melobi para anggota Constitutional Drafting Committee (CDC) dan CDA untuk memastikan bahwa Konstitusi akan mencakup perlindungan bagi orang-orang LGBT di Thailand (OutRight, 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut, CDA dalam merespon tuntutan komunitas LGBT untuk dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga, beberapa anggota CDA menyatakan bahwa komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender perlu diberikan perlindungan khusus terkait dengan hak-haknya namun beberapa anggota CDA yang lain memilih untuk abstain dari ketetapan tersebut mengingat masing-masing partai juga mewakili suara rakyat Thailand yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama Budha sehingga anggota parlemen pada CDA tersebut sepenuhnya mendukung Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga sebagai tuntutan komunitas LGBT hingga saat ini.

Beberapa anggota dari CDA di Thailand juga telah mengajukan poin-poin hukum yang baru terkait dengan perlindungan komunitas LGBT di Thailand terhadap segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi secara fisik maupun psikologis sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah Thailand sebagai negara

anggota PBB yakni perwujudan Hak Asasi Manusia bagi LGBT di Thailand sebagaimana yang dituntut oleh komunitas LGBT dalam poin-poin Rancangan Gender Ketiga. Ketetapan ini diketahui mendapatkan persetujuan dari hampir semua anggota CDA sebagaimana yang dikehendaki oleh *International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC)* yang menulis kepada ketua CDA untuk mendukung Anjaree dan aktivis LGBT Thailand lainnya serta mendesak anggota Majelis untuk memberikan perlindungan konstitusional bagi orang-orang yang mengalami diskriminasi atas dasar orientasi seksual mereka, identitas gender dan ekspresi gender.

Hal ini memancing respon dari Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan Kementerian Kehakiman yaitu pada tahun 2013 menyusun RUU Kemitraan Sipil untuk menyediakan pasangan sesama jenis dengan hak yang sama dengan pasangan yang sudah menikah, termasuk berbagi properti, pensiun, status pajak, dan tunjangan asuransi namun masih terhambat pada proses sidang di parlemen CDA (Areerat, 2017).

Selanjutnya pada tuntutan atau poin dalam Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga yang lain seperti mendapatkan pendidikan formal dan informal di Thailand tanpa disudutkan terkait dengan statusnya yang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender; kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan atau mendirikan usaha yang sama dengan komunitas non LGBT; persamaan hak antara peran laki-laki dan perempuan yang mereka terapkan sesuai statusnya sebagai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan pasangannya; dilegalkannya pernikahan sesama jenis sehingga memungkinkan mitra homoseksual, biseksual dan transgender memiliki hak waris dari pasangannya dan tuntutan untuk diberi hak dalam mengadopsi anak belum bisa dipenuhi oleh seluruh anggota CDA.

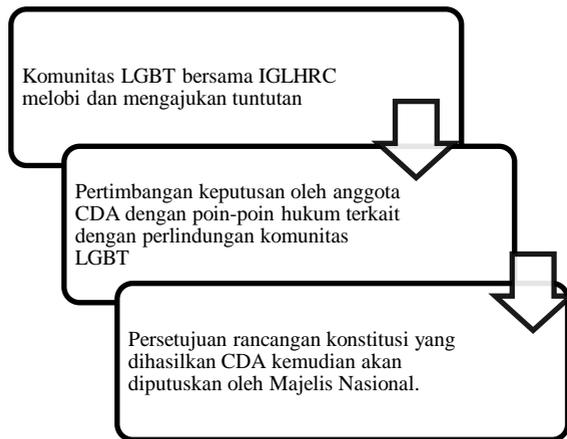
Beberapa poin-poin ajuan komunitas LGBT dalam Rancangan Gender Ketiga tersebut hingga saat ini belum bisa dipenuhi oleh CDA dan masih dipertimbangkan hingga mencapai mufakat oleh semua anggota CDA. Hal ini dikarenakan bahwa parlemen yang duduk di CDA harus memperhatikan masyarakat Thai sebagai kelompok mayoritas yang masih menjalankan nilai-nilai moral, spiritual serta norma masyarakat dimana mereka memiliki prinsip bahwa komunitas LGBT adalah komunitas yang tidak mengindahkan nilai-nilai tersebut. Di satu sisi, anggota parlemen juga merupakan wakil rakyat Thailand yang harus mendengarkan suara masyarakat Thai terkait dengan pandangan mereka terhadap keberadaan LGBT di Thailand. Kesulitan pencapaian mufakat ini berlangsung hingga pertengahan tahun 2015 yang berakibat pada makin gencarnya aksi-aksi para LGBT di Thailand dalam bentuk kampanye komunitas LGBT.

Hingga pada akhir tahun 2015, junta Thailand diketahui telah memberlakukan "*Gender Equality Act*", dan banyak kaum LGBT berharap bahwa mereka dapat melewati proses legislatif yang panjang di bawah pemerintahan sipil untuk mendorong Majelis Legislatif Nasional / *National Legislative Assembly* (NLA) yang ditunjuk junta untuk dengan cepat mengesahkan sebuah RUU yang mengakui keluarga LGBT dengan juga mengesahkan beberapa tuntutan dalam bentuk poin-poin di atas. Namun RUU yang diusulkan oleh komunitas LGBT tersebut masih tetap tertahan di bawah junta (Areerat, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah Thailand hingga saat ini masih belum bisa menyatukan aspirasi, pandangan dan ketetapan yang sinergis antar anggota parlemen mengingat parlemen di Thailand masih menunjukkan pernyataannya yang pro dan kontra terhadap penciptaan Undang-Undang untuk melindungi para LGBT tersebut.

Berikut tabel proses politik di Thailand dalam mengajukan tuntutan Rancangan Undang-Undang dari komunitas LGBT:

**Tabel 3.2: Proses pengajuan tuntutan Rancangan Undang-Undang dari komunitas LGBT**



Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber.

### **C. Reaksi PBB Terhadap Komunitas LGBT Di Thailand**

Fenomena gerakan komunitas LGBT di Thailand juga mendapat perhatian dari Organisasi untuk perdamaian dunia yakni PBB dimana melalui OHCHR telah mendukung keberadaan LGBT di Thailand sebagai salah satu perwujudan dari hak asasi manusia dalam mengekspresikan seksual mereka. Di satu sisi, OHCHR telah mengadakan beberapa aktivitas terkait dengan perlindungan para LGBT di Thailand berupa pembicaraan intensif dengan para parlemen di Thailand yang memuat rekomendasi untuk menghargai hak-hak seksual para LGBT serta memberikan imbauan untuk segera membentuk peraturan tertulis dalam bentuk landasan

hukum pada pemerintah sehubungan dengan perlindungan komunitas LGBT di Thailand.

OHCHR ini dibentuk dengan salah satu tujuannya yakni melindungi komunitas LGBT yang berada pada tiap negara di dunia yakni dengan melarang adanya diskriminasi serta kekerasan fisik atau psikososial pada mereka sehingga OHCHR memiliki peran untuk memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan LGBT di dunia yang didalamnya termasuk negara Thailand (United Nations, 2017).

OHCHR dalam memberikan perlindungan hukum pada komunitas LGBT adalah melalui beberapa teknik organisasi yakni membentuk komisi perlindungan publik terhadap kaum LGBT, menciptakan sekretariat jendral untuk menangani polemik keberadaan LGBT, serta mengadakan pertemuan khusus dengan pemerintah yang menghadapi polemik LGBT di negaranya yang dalam hal ini adalah juga melibatkan pemerintah Thailand terkait dengan penyelesaian konflik di negara tersebut (United Nations, 2017).

Sedangkan secara administratif, OHCHR dalam memberikan perlindungan hukum bagi komunitas LGBT di Thailand adalah dengan melakukan pengawasan serta sanksi hukum bagi negara yang melakukan diskriminasi ataupun kekerasan pada komunitas LGBT dimana dalam merealisasikan perannya secara administratif tersebut, OHCHR selalu bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah Thailand.

OHCHR diketahui juga telah menjalin komunikasi dengan masyarakat Thailand melalui perwakilannya di parlemen Thailand selain juga perwakilan dari komunitas LGBT terkait dengan diskriminasi serta kekerasan yang dialami oleh para LGBT.

Terkait dengan pertemuan khusus antara OHCHR, pemerintah Thailand, Thai dan LGBT tersebut, hingga saat ini masih belum menghasilkan kesepakatan yang masif sehubungan dengan beberapa faktor yang

mempengaruhinya diantaranya adalah penerimaan golongan masyarakat homogen dimana kelompok masyarakat ini adalah kelompok terbesar di Thailand yang masih menjunjung tinggi peradapan spiritual Budha dan nilai-nilai spiritual sejarah Thailand yang menghadapkan pada keaslian gender dalam interaksi sosial sehari-hari sehingga masih belum dapat sepenuhnya menerima keberadaan LGBT di Thailand.

Selanjutnya dari pihak pemerintah Thailand hingga saat ini masih belum bisa menyatukan aspirasi, pandangan dan ketetapan yang sinergis antar anggota parlemen mengingat parlemen di Thailand masih menunjukkan pernyataannya yang pro dan kontra terhadap penciptaan Undang-Undang untuk melindungi para LGBT tersebut.

OHCHR dalam menghadapi kasus tersebut diketahui hingga saat ini masih terus melakukan pengawasan khusus serta lobi politik dengan pemerintah Thailand dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum LGBT serta mendesak untuk segera menciptakan ketentuan hukumnya sehingga menghindarkan komunitas LGBT dalam memperoleh diskriminasi serta kekerasan fisik ataupun psikologis ke depannya.

PBB dalam memberikan respon terhadap gerakan komunitas LGBT di Thailand juga diwujudkan melalui pembentukan organisasi yakni UNDP dimana tujuan dalam pembentukannya adalah menjadi perpanjangan tangan dari OHCHR dimana UNDP memberikan beberapa fasilitas berupa sarana dan prasarana baik terhadap pemerintah Thailand maupun kepada komunitas LGBT itu sendiri.

UNDP diketahui telah memberikan dukungan berupa pemberian material berupa dana dukungan untuk keberadaan LGBT di Thailand kepada pemerintah Thailand dengan bekerjasama kedutaan Swedia sebesar kurang lebih sebesar 27 miliar rupiah pada tahun 2016. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah Thailand dalam

rangka untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBT di Thailand serta untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (Hutapea, 2016).

UNDP meminta pemerintah Thailand dalam memajukan kesejahteraan LGBT di Thailand adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatannya dan pembangunan fasilitas kesehatan untuk upaya preventif hingga kuratif. Selanjutnya UNDP juga menghimbau pemerintah Thailand untuk meningkatkan kualitas pendidikan berupa pemberian edukasi seksual serta kelayakan pendidikan yakni meningkatkan skill atau keterampilan di berbagai bidang sehingga berguna bagi kehidupan para LGBT di masa mendatang. Di satu sisi, pemerintah Thailand juga bekerjasama dengan institusi kesehatan di Thailand untuk memberikan penyuluhan kepada para LGBT agar terhindar dari virus HIV/AIDS yang beresiko diderita oleh komunitas LGBT di Thailand yang diagendakan pada tahun 2016 hingga tahun 2030 (United Nations, 2017).

UNDP selanjutnya juga menghimbau Pemerintah Thailand untuk memberikan sarana berupa media informasi pada para LGBT di Thailand yakni sarana media dengan teknologi informatika untuk menyuarakan aspirasi, pendapat dan ekspresi seksualnya pada khalayak luas dengan tujuan untuk menyadarkan para kelompok Thai yang menentang keberadaan mereka serta upayanya dalam mengurangi atau terhindar dari segala bentuk diskriminasi atau kriminalisasi di berbagai aspek kehidupan mereka (UNDP & USAID, 2014).

Sedangkan upaya UNDP dalam mendukung keberadaan LGBT secara langsung di Thailand adalah berupa dukungan moral secara terus-menerus pada komunitas LGBT serta dukungannya untuk terus menyuarakan hak-hak mereka terkait dengan kebebasan ekspresi seksualnya serta menumbuhkan semangat untuk tetap mendorong pemerintah Thailand agar segera

mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga sebagai upayanya untuk mendapatkan perlindungan pemerintah Thailand dari aksi diskriminasi sosial oleh masyarakat Thailand.

UNDP pada tahun 2015 juga pernah bekerjasama dengan ILGA and OutRight Action International untuk memberikan pengertian berupa sharing sosial terhadap masyarakat Thailand terkait dengan segala kehidupan komunitas LGBT di Thailand serta fungsi dan manfaat positif yang bisa diambil saat hidup berdampingan dengan kaum LGBT (United Nations, 2017).

Hingga saat ini, UNDP dari PBB terus menggodok dan menggiatkan segala bentuk dan strategi para komunitas LGBT untuk terus melobi para parlemen di Thailand selain melakukan negosiasi dengan para birokrasi dan militer Thailand terkait dengan efisiensi serta keefektifan gerakan komunitas LGBT tersebut di Thailand. UNDP tetap mengupayakan beberapa kebijakannya yang diketahui untuk meningkatkan hak-hak komunitas LGBT di segala bidang.

UNDP juga telah bekerjasama dengan Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions yang mengembangkan serta mendukung hak asasi manusia untuk komunitas LGBT berupa penyelenggaraan sharing hingga perlindungan psikologis serta fisik komunitas LGBT di Thailand terkait dengan dukungan orientasi seksual mereka, identitas seksual, serta perlindungan pada beberapa kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender terkait dengan hak-hak mereka di Thailand.

Berikut adalah respon organisasi internasional OHCHR dan UNDP terhadap komunitas LGBT di Thailand:

**Tabel 3.3. Respon OHCHR dan UNDP terhadap Kelompok LGBT**

<b>Organisasi Internasional</b>	<b>Respon terhadap LGBT</b>
<b>OHCHR</b>	Mengadakan beberapa aktivitas terkait dengan perlindungan para LGBT di Thailand yang memuat rekomendasi untuk menghargai hak-hak seksual para LGBT.
<b>UNDP</b>	Dengan <i>Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions</i> mendukung hak asasi manusia untuk LGBT berupa penyelenggaraan sharing hingga perlindungan psikologis serta fisik untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber.